

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSELERASI PENERBITAN KARTU KELUARGA DI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Robby H Wetipo

NPP. 32.1080

Asdaf Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.1080@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Mgs. Ismail, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) Administrative services in Yahukimo Regency face serious obstacles, resulting in a low ownership rate of Family Cards (Kartu Keluarga/KK). Despite government programs, the issuance of KK has not kept pace with population growth. Geographical barriers, limited physical and digital infrastructure, and low public awareness have contributed to this issue. Moreover, there is a lack of in-depth studies exploring the role of community participation in accelerating KK issuance in remote and socially complex areas like Yahukimo. **Purpose:** This study aims to analyze community participation in accelerating the issuance of Family Cards in Yahukimo Regency. **Method:** A qualitative research method was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. **Results:** The results show that community participation can be viewed through four main dimensions: involvement, contribution, awareness, and partnership. The contribution dimension was the most effective, with active community roles in document preparation and local verification helping reduce processing time by up to 85%. However, involvement, awareness, and partnership remain hindered by low education levels and limited understanding of the importance of population documents. The obstacles are multidimensional, including geographical challenges, infrastructure limitations, human resources, and sociocultural and administrative policy barriers. **Conclusion:** Community participation especially in the form of contributions plays a key role in accelerating the issuance of Family Cards in Yahukimo Regency. Nevertheless, greater awareness, engagement, and collaboration are still needed. An adaptive approach such as mobile services, cooperation with local leaders, simplified procedures, and culturally appropriate policy advocacy is recommended. The Civil Registry Office of Yahukimo plays a strategic role by acting as a policy implementer, service provider, facilitator, and data manager, where innovation and contextual adaptation are essential to success.

Keywords: Community Participation, Family Card, Yahukimo, Civil Administration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Yahukimo menghadapi hambatan serius yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Meskipun program pemerintah telah dilaksanakan, peningkatan penerbitan KK belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi faktor utama penghambat. Selain itu, kajian mengenai partisipasi masyarakat

dalam percepatan penerbitan KK di daerah dengan kondisi sosial dan geografis kompleks seperti Yahukimo masih sangat terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu keterlibatan, kontribusi, kesadaran, dan kemitraan. Dimensi kontribusi terbukti paling efektif, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam kelengkapan dokumen dan verifikasi oleh tokoh lokal mampu mempercepat proses pelayanan hingga 85%. Namun, dimensi keterlibatan, kesadaran, dan kemitraan masih terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat Dalam Akselerasi Penerbitan Kartu Keluarga Di Kabupaten Yahukimo sudah menunjukkan partisipasi yang aktif. Namun memang masih ditemuka beberapa hambatan. Untuk itu perlunya peningkatan Pendekatan adaptif seperti layanan jemput bola, kolaborasi dengan tokoh adat, penyederhanaan prosedur, dan advokasi kebijakan berbasis lokal menjadi solusi penting.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kartu Keluarga, Yahukimo, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era desentralisasi di Indonesia sekarang ini, strategi penguatan teknologi komunikasi dan informatika sudah seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya teritorialnya berupa pulau-pulau atau daratan dengan tingkat keterisolasiannya tinggi (Indrayani & Gatingsih: 2013). Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan kompetitif, kualitas serta integritas SDM menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Craig: 2023). Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menjadi kunci keberhasilan pencapaian sistem administrasi yang akurat, transparan, dan berdaya guna. Partisipasi ini tidak sebatas pada pemanfaatan layanan, namun juga mencakup dukungan terhadap kelancaran proses, validitas data, serta keberhasilan implementasi sistem kependudukan berbasis digital.

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen kependudukan fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan KK menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan efektivitas peran negara dalam menjamin hak dasar warga negara.

Meskipun demikian, data Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2023 menunjukkan masih terdapat disparitas kepemilikan KK antar wilayah di Indonesia. Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah dengan angka kepemilikan KK terendah, yaitu hanya 65%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 85,7%. Kondisi ini menjadi perhatian karena Kabupaten Yahukimo mencatat peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, dari 181.000 jiwa pada 2019 menjadi 355.471 jiwa pada 2023. Namun, peningkatan jumlah penerbitan KK tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk tersebut. ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan

globalisasi dan implementasi teknologi digital (Valdivia& López: 2022)

Permasalahan ini diperparah dengan tantangan geografis dan infrastruktur. Sebanyak

65% wilayah Kabupaten Yahukimo hanya dapat diakses melalui jalur udara, dengan keterbatasan transportasi, listrik, dan jaringan internet. Tingkat penetrasi akses digital hanya mencapai 42,1%, menghambat penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi tidak merata, dan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dalam hasil studi yang dilakukan oleh Giotopoulos (2025) mengungkapkan bahwa Meningkatnya kompleksitas operasi sektor publik dan kebutuhan akan alokasi tugas yang adil menyoroti keterbatasan metode evaluasi konvensional, yang sering gagal memperhitungkan variasi dalam kinerja karyawan dan tuntutan beban kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo telah berupaya melalui program jemput bola dan penguatan sistem informasi. Namun, efektivitas dari upaya tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam konteks pemberdayaan partisipasi masyarakat yang adaptif terhadap kondisi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran serta masyarakat dalam mempercepat penerbitan KK, serta merumuskan strategi pelayanan kependudukan yang relevan dengan karakteristik wilayah terpencil seperti Kabupaten Yahukimo.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Yahukimo mengalami hambatan serius yang berdampak pada rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Keluarga. Meskipun terdapat berbagai program dan strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah, hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam capaian kepemilikan KK dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran serta masyarakat dalam mendukung akselerasi penerbitan dokumen kependudukan tersebut.

Kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, serta rendahnya akses terhadap layanan publik menjadi faktor utama yang menghambat proses administrasi kependudukan. Namun, faktor-faktor tersebut belum cukup menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan KK. Kurangnya pemahaman, keterlibatan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen ini juga menjadi bagian dari permasalahan yang belum sepenuhnya terungkap.

Hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara khusus menelusuri partisipasi masyarakat dalam konteks percepatan penerbitan KK di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang kompleks seperti Yahukimo. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menggali sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses penerbitan KK, apa saja kendala yang mereka hadapi, serta bagaimana strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan di wilayah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Partisipasi Masyarakat dalam program pemerintah.

Penelitian Pertama oleh Yulius Bahabol, Christoffel B. D. Pakasi, dan Jefry F. J. Timban (2018) yang berjudul “Partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur jalan pertanian melalui (PNPM-PPIP) di Desa Kini Kecamatan Hilipuk Kabupaten Yahukimo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif terhadap percepatan pembangunan di daerah terpencil. Masyarakat aktif terlibat dalam berbagai tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan

program PNPM-PPIP di Desa Kini menunjukkan bahwa dukungan langsung masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam hal administrasi dan pelayanan publik. Namun, masih ditemukan kendala dalam aspek teknis dan pembinaan yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

Penelitian Kedua oleh Sri Utami (2016) yang berjudul “Pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan)”. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat yang aktif mencari informasi, mematuhi prosedur, dan memberikan masukan terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan e-KTP. Penelitian ini juga mencatat bahwa kinerja aparatur pemerintah merupakan faktor pendukung yang penting, namun keterlibatan masyarakat tetap menjadi kunci utama keberhasilan layanan kependudukan, termasuk untuk dokumen lain seperti Kartu Keluarga.

Penelitian Ketiga oleh Fitri Anugerah Iffah Putri dan Indah Ika Puspaningrum (2023) yang berjudul “Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan berbasis identitas kependudukan digital (Suatu studi di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam memanfaatkan layanan berbasis digital untuk administrasi kependudukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diterima, termasuk kecepatan penerbitan dokumen dan keakuratan data. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman masyarakat tentang layanan digital dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat desa.

Penelitian Keempat oleh Eka Wahyu Lestari (2015) yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan (Kajian pada pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, masih rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi. Penelitian ini menyarankan perlunya upaya edukatif dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih proaktif dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga.

Penelitian Kelima oleh Siti Aminah Sumiati dan Lestari (2020) yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi kependudukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013. Masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memahami hak dan kewajibannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif, dan dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dari pemerintah daerah agar kebijakan kependudukan dapat berjalan optimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan yang penting baik dari sisi substansi, pendekatan, maupun konteks wilayah yang diteliti. Tidak seperti lima penelitian terdahulu yang lebih umum membahas partisipasi masyarakat dalam konteks pelayanan kependudukan secara administratif atau digital, penelitian ini secara khusus mendalami partisipasi masyarakat dalam akselerasi

penerbitan Kartu Keluarga (KK) di wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang sangat menantang, yaitu Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan.

Penelitian Bahabol et al. (2018) memang telah mengkaji partisipasi masyarakat di Yahukimo, namun fokusnya terbatas pada pembangunan infrastruktur jalan pertanian, bukan administrasi kependudukan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini menjadi lebih relevan karena secara spesifik membedah bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pelayanan administrasi yang vital seperti KK, di tengah keterbatasan infrastruktur dan tantangan budaya yang khas.

Berbeda dengan penelitian oleh Sri Utami (2016), yang hanya menyoroti pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur terhadap layanan e-KTP di Nunukan, penelitian ini tidak hanya menilai keterlibatan masyarakat, tetapi juga menganalisis secara multidimensi melalui empat indikator utama: keterlibatan, kontribusi, kesadaran, dan kemitraan. Keempat dimensi ini saling memperkaya analisis partisipasi dan menawarkan kerangka konseptual baru yang lebih utuh.

Penelitian oleh Putri dan Puspaningrum (2023) telah mengulas partisipasi masyarakat dalam konteks layanan digital di Sumenep, namun belum menyentuh tantangan geografis dan sosial-budaya yang kompleks seperti di Yahukimo. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menguraikan bagaimana rendahnya penetrasi digital, akses transportasi terbatas, dan keterbatasan literasi memengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan dasar.

Eka Wahyu Lestari (2015) mengangkat kesadaran masyarakat terhadap akta kelahiran di Surabaya, namun belum menggali partisipasi masyarakat dalam konteks kemitraan formal dan informal seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tokoh adat, tokoh agama, dan relawan kampung menjadi aktor penting dalam menjembatani masyarakat dengan sistem administrasi formal.

Begitu pula dengan Sumiati dan Lestari (2020), yang fokus pada implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara umum, tanpa menelusuri bagaimana faktor geografis, sosial, dan budaya memengaruhi tingkat keberhasilan program di lapangan. Penelitian ini justru menghadirkan pendekatan yang kontekstual dan lapangan, memperlihatkan secara rinci tantangan faktual dan strategi adaptif yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil di daerah ekstrem seperti Yahukimo.

Selain dari segi konten, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan data mikro, temuan lapangan yang mendalam, serta pemetaan faktor penghambat dalam lima dimensi: geografis, sumber daya, sosial-budaya, administratif, dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur tentang partisipasi masyarakat, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pelayanan kependudukan dapat dirancang lebih inklusif dan adaptif di wilayah-wilayah dengan tantangan ekstrim seperti Papua Pegunungan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo dalam mengakselerasi penerbitan Kartu Keluarga. Serta faktor-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dan proses akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, kelompok fokus, etnografi, dan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi. Memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Selanjutnya menurut Fatimah (2019), pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif, data dan proses penelitiannya lebih menekankan pada makna, konteks, dan interpretasi sosial.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo.

Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangungsong, 2017:190). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo. Partisipasi masyarakat dalam konteks penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu keterlibatan, kontribusi, kesadaran, dan kemitraan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan secara kolektif memengaruhi efektivitas proses akselerasi penerbitan Kartu Keluarga.

3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Akselerasi Penerbitan Kartu Keluarga

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). Partisipasi masyarakat dalam konteks penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu keterlibatan, kontribusi, kesadaran, dan kemitraan. Keempat dimensi

ini saling berkaitan dan secara kolektif memengaruhi efektivitas proses akselerasi penerbitan Kartu Keluarga.

1. Dimensi Keterlibatan

Keterlibatan masyarakat merupakan komponen fundamental dalam mendukung akselerasi penerbitan Kartu Keluarga. Dimensi ini merefleksikan sejauh mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses penerbitan Kartu Keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, dimensi keterlibatan dilihat melalui dua indikator utama, yaitu bentuk keterlibatan masyarakat dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan Kartu Keluarga.

a. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penerbitan KK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo cukup beragam, mencerminkan adaptasi terhadap kondisi geografis dan sosial-budaya yang khas di wilayah ini.

Terdapat tiga bentuk utama keterlibatan masyarakat, yaitu keterlibatan langsung melalui kunjungan ke kantor Disdukcapil dimana masyarakat secara langsung datang melakukan pengurusan dokumen KK, keterlibatan dalam program jemput bola dimana ketika Disdukcapil melakukan jemput bola masyarakat yang belum memiliki KK dapat berpartisipasi dalam mengurus Dokumen KK di lokasi Jemput bola, dan keterlibatan tidak langsung melalui representasi oleh tokoh masyarakat dimana tokoh masyarakat membantu memfasilitasi mengumpulkan persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan dokumen KK dan membawanya ke kantor Disdukcapil.

Keterlibatan dalam membantu sesama warga dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi. Ini menunjukkan adanya modal sosial berupa gotong royong dan saling membantu di antara masyarakat Kabupaten Yahukimo, yang dapat menjadi faktor pendukung dalam akselerasi penerbitan KK. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti juga menemukan bentuk keterlibatan lain, yaitu keterlibatan masyarakat dalam forum-forum pertemuan kampung, di mana isu administrasi kependudukan termasuk pengurusan KK menjadi salah satu agenda yang dibahas. Forum-forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait pengurusan KK, yang secara tidak langsung mendukung akselerasi penerbitan KK.

b. Tingkat Keterlibatan Masyarakat

Meskipun bentuk keterlibatan masyarakat cukup beragam, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo masih bervariasi dengan kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Data statistik dari Disdukcapil Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa dari total estimasi sekitar 70.000 keluarga di Kabupaten Yahukimo, hanya sekitar 42.000 keluarga (60%) yang telah memiliki KK per Desember 2024. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan dalam kepemilikan KK di Kabupaten Yahukimo.

Tingkat keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, pengetahuan, persepsi tentang biaya, dan akses transportasi. Dari observasi lapangan, peneliti juga menemukan adanya variasi tingkat keterlibatan berdasarkan kelompok usia dan gender. Generasi muda (usia 20-40 tahun) cenderung lebih aktif dalam pengurusan KK dibandingkan generasi yang lebih tua. Sementara itu, laki-laki, terutama kepala keluarga, lebih dominan dalam pengurusan KK dibandingkan perempuan, yang mencerminkan norma sosial-budaya yang masih patriarkis di masyarakat Kabupaten Yahukimo.

Dimensi Kontribusi

Kontribusi masyarakat merupakan bentuk dukungan konkret yang diberikan untuk memperlancar proses penerbitan Kartu Keluarga. Berbeda dengan keterlibatan yang menekankan pada partisipasi, dimensi kontribusi lebih fokus pada nilai tambah yang diberikan oleh masyarakat untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses penerbitan KK. Dimensi ini dilihat melalui dua indikator, yaitu kontribusi masyarakat dalam mendukung kelancaran proses dan bentuk kontribusi masyarakat.

c. Kontribusi Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Proses Penerbitan KK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat memiliki peran signifikan dalam mendukung kelancaran proses penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo. Kontribusi masyarakat berperan penting dalam tiga aspek utama proses penerbitan KK, yaitu akurasi data, efisiensi proses, dan perluasan jangkauan layanan. Keakuratan data yang diberikan oleh masyarakat membantu mengurangi kesalahan dalam pemrosesan KK, yang pada gilirannya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dan koreksi. Efisiensi proses dicapai ketika masyarakat memahami dan mematuhi persyaratan dan prosedur, sehingga mengurangi pengulangan proses dan penundaan. Perluasan jangkauan layanan didukung oleh keterlibatan relawan dari masyarakat yang membantu menjembatani kesenjangan antara Disdukcapil dan masyarakat di daerah terpencil.

Dampak langsung dari kontribusi masyarakat terhadap efisiensi waktu penerbitan KK. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi masyarakat tidak hanya berdampak pada tahap awal proses penerbitan KK, tetapi juga pada seluruh siklus administrasi kependudukan, termasuk pembaruan data setelah penerbitan KK.

Peran penting mediator lokal yang memahami baik konteks masyarakat maupun persyaratan administratif, yang dapat menjembatani kesenjangan antara sistem formal dan kondisi masyarakat di lapangan. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa kontribusi masyarakat dalam bentuk dukungan logistik lokal, seperti penyediaan tempat dan konsumsi untuk kegiatan jemput bola, juga menjadi faktor pendukung kelancaran proses penerbitan KK. Ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat tidak hanya dalam bentuk kepatuhan terhadap persyaratan administratif, tetapi juga dalam bentuk dukungan material dan non-material.

d. Bentuk Kontribusi Masyarakat

Bentuk kontribusi masyarakat dalam proses penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo cukup beragam, mencerminkan adaptasi terhadap konteks lokal dan kapasitas masyarakat. Berbagai bentuk kontribusi masyarakat, mulai dari kontribusi administratif (penyediaan dokumen) hingga kontribusi logistik (penyediaan tempat). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat tidak terbatas pada aspek teknis-administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial-organisasional yang mendukung implementasi program penerbitan KK.

Peran tokoh masyarakat dalam verifikasi awal data, yang merupakan bentuk kontribusi penting mengingat keterbatasan sumber daya Disdukcapil untuk melakukan verifikasi langsung di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme verifikasi berbasis komunitas yang dapat meningkatkan akurasi data dan mengurangi beban kerja petugas Disdukcapil.

Kontribusi yang lebih rinci di tingkat masyarakat, termasuk pendampingan dan bantuan khusus bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Ini menunjukkan adanya sistem dukungan informal di masyarakat yang melengkapi sistem formal pemerintah.

Berdasarkan observasi lapangan, peneliti juga menemukan bentuk kontribusi lain, yaitu inisiatif beberapa kampung untuk membuat database kependudukan sederhana di tingkat kampung, yang berisi informasi dasar tentang keluarga-keluarga di kampung tersebut. Database ini, meskipun sederhana, membantu dalam proses identifikasi keluarga yang belum memiliki KK dan memfasilitasi koordinasi dengan petugas Disdukcapil.

2. Dimensi Kesadaran

Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan tingkat partisipasi dalam pengurusan Kartu Keluarga. Dimensi ini merupakan prasyarat untuk keterlibatan dan kontribusi yang efektif, karena tanpa kesadaran yang memadai tentang pentingnya KK, masyarakat cenderung tidak termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses penerbitan KK. Dimensi ini dilihat melalui dua indikator, yaitu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KK dan upaya Dinas Dukcapil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kepemilikan KK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Yahukimo terhadap pentingnya kepemilikan KK masih bervariasi, dengan perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok masyarakat.

Pola kesadaran yang berbeda berdasarkan faktor geografis (perkotaan vs pedesaan) dan faktor pendidikan. Kesadaran yang lebih tinggi di daerah perkotaan disebabkan oleh akses informasi yang lebih baik dan interaksi yang lebih intensif dengan sistem formal pemerintahan yang mensyaratkan dokumen kependudukan.

Kesenjangan yang signifikan dalam tingkat kesadaran dan kepemilikan KK antara distrik yang dekat dengan pusat pemerintahan dan distrik terpencil. Kesenjangan ini mencerminkan pola pembangunan yang belum merata dan akses informasi yang terbatas di daerah terpencil. Karakteristik kesadaran yang "reaktif" vs "proaktif" dan perbedaan generasional dalam tingkat kesadaran. Pola kesadaran reaktif, di mana masyarakat baru mengurus KK ketika ada kebutuhan mendesak, menunjukkan bahwa KK belum dilihat sebagai kebutuhan dasar tetapi lebih sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses perubahan kesadaran di tingkat individu, yang dipicu oleh pengalaman konkret tentang konsekuensi tidak memiliki KK. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung dapat menjadi katalisator untuk perubahan kesadaran, yang kemudian dapat menyebar melalui jaringan sosial informal. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti juga menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi dan pekerjaan. Masyarakat yang bekerja di sektor formal seperti PNS, guru, dan pegawai perusahaan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya KK dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal atau subsisten. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang lebih intensif dengan sistem administratif formal dalam pekerjaan mereka. Di Kabupaten Yahukimo, sebagian besar masyarakat masih berada pada tahap kesadaran naif, di mana mereka baru mengurus KK ketika ada kebutuhan mendesak, belum mencapai tahap kesadaran kritis di mana mereka secara proaktif mengurus KK sebagai bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara.

b. Upaya Dinas Dukcapil dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Untuk mengatasi keterbatasan kesadaran masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo telah melakukan berbagai upaya yang diadaptasi dengan konteks lokal. Pendekatan multi-saluran dalam upaya peningkatan kesadaran, yang mengombinasikan saluran formal (sosialisasi, program jemput bola) dan saluran informal (kerja

sama dengan tokoh adat dan agama). Pendekatan ini menunjukkan adaptasi terhadap realitas sosial-budaya di Kabupaten Yahukimo, di mana tokoh adat dan agama memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas. Aspek penyederhanaan prosedur dan peningkatan kapasitas petugas lokal, yang merupakan pendekatan supply-side untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat perlu didukung oleh reformasi sistem pelayanan untuk memastikan bahwa masyarakat yang sudah sadar dapat mengakses layanan dengan mudah.

Pendekatan insentif dan pendekatan edukatif yang diadaptasi dengan tingkat literasi masyarakat. Program "Bulan Sadar Administrasi Kependudukan" merupakan contoh pendekatan kampanye terfokus yang mengombinasikan sosialisasi dan pelayanan langsung, yang dapat menciptakan momentum untuk akselerasi penerbitan KK.

Efektivitas beberapa pendekatan seperti sosialisasi dan program jemput bola, tetapi juga mengidentifikasi area untuk perbaikan, termasuk frekuensi sosialisasi dan penggunaan institusi keagamaan sebagai saluran tambahan. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti juga menemukan bahwa upaya peningkatan kesadaran yang melibatkan demonstrasi konkret tentang manfaat kepemilikan KK (misalnya, menunjukkan bagaimana KK memfasilitasi akses ke berbagai program bantuan sosial) cenderung lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi yang bersifat umum dan abstrak.

Upaya Dinas Dukcapil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti sosialisasi, kerjasama dengan tokoh adat, program jemput bola, dan penyederhanaan prosedur, menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Program "Bulan Sadar Administrasi Kependudukan" dan pemberian insentif berupa kemudahan akses ke layanan publik bagi pemilik KK merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik lokal masyarakat Kabupaten Yahukimo.

3. Dimensi Kemitraan

Kemitraan antara masyarakat dan Dinas Dukcapil menjadi faktor penting dalam mendukung akselerasi penerbitan Kartu Keluarga. Dimensi ini merefleksikan hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, yang melampaui hubungan satu arah di mana pemerintah hanya bertindak sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dimensi ini dilihat melalui dua indikator, yaitu kerjasama antara masyarakat dan Dinas Dukcapil serta mekanisme koordinasi dan komunikasi.

a. Kerjasama antara Masyarakat dan Dinas Dukcapil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan Dinas Dukcapil di Kabupaten Yahukimo telah mulai berkembang melalui berbagai mekanisme, meskipun masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan.

Pendekatan institusional dalam membangun kemitraan, melalui pembentukan forum formal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum kemitraan di tingkat distrik merupakan mekanisme untuk memfasilitasi komunikasi dua arah dan koordinasi antara Disdukcapil dan masyarakat, yang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program penerbitan KK.

Peran intermediasi yang dimainkan oleh relawan kampung dan lembaga-lembaga lokal dalam menjembatani kesenjangan antara Disdukcapil dan masyarakat. Sistem relawan kampung merupakan bentuk desentralisasi fungsi informasi dan fasilitasi, yang dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Kemitraan dalam pendataan dan verifikasi, yang merupakan fungsi teknis-administratif krusial dalam proses penerbitan KK. Sistem pendataan berbasis kampung merupakan bentuk inovasi yang mengadaptasi proses administratif dengan konteks lokal, yang dapat meningkatkan ketepatan dan kelengkapan data kependudukan.

Evolusi kemitraan dari pendekatan top-down menjadi pendekatan participatory planning, yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam administrasi publik, dari model birokrasi tradisional menuju governance yang lebih kolaboratif dan responsif.

Implementasi kemitraan di tingkat mikro, dengan sistem koordinator kampung dan kunjungan berkala petugas Disdukcapil. Sistem ini mencerminkan adaptasi pola pelayanan dengan mempertimbangkan keterbatasan akses geografis, meskipun masih menghadapi tantangan implementasi seperti ketidakpastian jadwal kunjungan. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa kualitas kemitraan bervariasi antar distrik, dengan faktor kepemimpinan lokal dan hubungan historis antara komunitas dan pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kemitraan. Di distrik-distrik dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan hubungan yang baik dengan pemerintah, kemitraan cenderung lebih efektif dalam mendukung akselerasi penerbitan KK. Forum kemitraan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan Disdukcapil merupakan langkah positif dalam membangun kemitraan yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.

b. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi

Untuk mendukung kemitraan yang efektif, diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang jelas dan berfungsi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Yahukimo telah mengembangkan berbagai mekanisme koordinasi dan komunikasi, meskipun masih menghadapi tantangan implementasi.

Pendekatan komprehensif dalam pengembangan mekanisme koordinasi dan komunikasi, yang mencakup berbagai tingkatan administratif dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Pendekatan multi-channel ini mengakui keragaman akses informasi di masyarakat Kabupaten Yahukimo dan berupaya menjangkau berbagai kelompok masyarakat melalui saluran yang paling sesuai.

Pentingnya adaptasi bahasa dan metode komunikasi dalam konteks masyarakat dengan keragaman bahasa dan tingkat literasi. Penggunaan visual dan audio untuk masyarakat yang tidak bisa membaca merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.

Sistem pendataan berbasis kampung sebagai mekanisme koordinasi yang mendukung perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Sistem ini merupakan bentuk integrasi antara sistem pendataan formal dan mekanisme lokal, yang dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kependudukan.

Pengembangan calendar of services sebagai alat untuk meningkatkan prediktabilitas layanan, yang dapat membantu masyarakat merencanakan dan mempersiapkan diri untuk mengurus KK. Pelibatan penerjemah lokal dalam tim jemput bola merupakan bentuk adaptasi untuk mengatasi hambatan bahasa dalam komunikasi dengan masyarakat di daerah terpencil.

Implementasi mekanisme komunikasi di tingkat mikro, dengan peran sentral kepala kampung sebagai penghubung dan pentingnya institusi lokal seperti gereja dan pertemuan adat sebagai saluran komunikasi. Keterlambatan informasi yang kadang-kadang terjadi menunjukkan

masih adanya tantangan dalam implementasi mekanisme komunikasi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses komunikasi. Berdasarkan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa efektivitas mekanisme koordinasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur komunikasi yang tersedia. Di daerah dengan akses telekomunikasi yang baik, mekanisme koordinasi dan komunikasi cenderung lebih efektif, sementara di daerah terpencil tanpa akses telekomunikasi, komunikasi masih sangat tergantung pada kunjungan fisik, yang dapat terkendala oleh faktor geografis dan cuaca. Penggunaan berbagai saluran komunikasi dan adaptasi metode komunikasi untuk masyarakat dengan tingkat literasi rendah mencerminkan pendekatan komunikasi yang inklusif dan adaptif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo, masih terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi beberapa kategori faktor penghambat yang saling berkaitan dan membentuk kompleksitas tantangan dalam akselerasi penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo.

a. Faktor Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Yahukimo yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan jarak antar permukiman yang jauh menjadi faktor penghambat fundamental dalam akselerasi penerbitan KK. Dua dampak utama dari faktor geografis: kesulitan akses masyarakat ke kantor Disdukcapil dan tantangan bagi Disdukcapil untuk menjangkau masyarakat melalui program jemput bola. Biaya tinggi dan ketergantungan pada kondisi cuaca untuk transportasi udara menambah kompleksitas logistik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Data menunjukkan bahwa dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, hanya 8 distrik (16%) yang dapat diakses melalui transportasi darat dari Dekai, 23 distrik (45%) hanya dapat diakses melalui transportasi udara, dan 20 distrik (39%) memerlukan kombinasi transportasi udara dan jalan kaki selama beberapa jam hingga beberapa hari. Kondisi ini menciptakan kesenjangan aksesibilitas yang signifikan antara berbagai wilayah di Kabupaten Yahukimo.

Dampak ketidakpastian cuaca terhadap perencanaan dan implementasi program jemput bola. Ketidakpastian ini berdampak pada prediktabilitas layanan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi program pelayanan KK. Faktor geografis tidak hanya berdampak pada aksesibilitas fisik, tetapi juga pada konektivitas komunikasi dan informasi. Dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, hanya 15 distrik (29%) yang memiliki jaringan telepon seluler yang stabil, sementara 36 distrik lainnya (71%) memiliki jaringan terbatas atau tidak ada sama sekali. Keterbatasan konektivitas ini memengaruhi efektivitas koordinasi dan sosialisasi program penerbitan KK. Beberapa konsekuensi konkret dari tantangan geografis: biaya transportasi yang tinggi, waktu perjalanan yang panjang, dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari meninggalkan pekerjaan. Faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan disinsentif ekonomi yang signifikan bagi masyarakat untuk mengurus KK, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk dokumen tersebut. Faktor geografis yang berupa kondisi pegunungan dan jarak antar permukiman yang jauh merupakan tantangan struktural yang memerlukan adaptasi kebijakan. Di Kabupaten Yahukimo, konteks geografis memerlukan pendekatan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, dengan penekanan pada strategi jemput bola, desentralisasi layanan, dan penggunaan teknologi tepat guna untuk mengatasi hambatan aksesibilitas.

b. Faktor Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, infrastruktur, maupun finansial,

menjadi faktor penghambat signifikan dalam akselerasi penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo.

Kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur dengan kebutuhan aktual untuk pelayanan optimal. Rasio 35 pegawai untuk 350.000 penduduk (1:10.000) sangat jauh dari ideal, terutama dengan tantangan geografis yang ada. Keterbatasan peralatan teknologi informasi juga memengaruhi efisiensi dan kecepatan pelayanan.

Kesenjangan antara kebutuhan anggaran untuk menjangkau seluruh distrik dan ketersediaan anggaran aktual. Keterbatasan anggaran berdampak pada frekuensi dan jangkauan program jemput bola, yang pada gilirannya mempengaruhi aksesibilitas layanan bagi masyarakat di distrik terpencil. Data menunjukkan bahwa dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, rata-rata hanya 15-20 distrik yang mendapatkan program jemput bola setiap tahun, sementara distrik lainnya harus menunggu tahun berikutnya. Pola rotasi ini menyebabkan kesenjangan waktu yang signifikan dalam akses layanan antarwilayah.

Selain keterbatasan kuantitas, Kabupaten Yahukimo juga menghadapi tantangan dalam kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kompetensi teknis. Dari 35 pegawai Disdukcapil, hanya 18 orang (51%) yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan administrasi kependudukan. Kesenjangan kompetensi ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelayanan, terutama dalam penggunaan sistem informasi dan penanganan kasus-kasus kompleks. Keterbatasan sumber daya juga terlihat dalam infrastruktur pendukung pelayanan. Dari 51 distrik, hanya 8 distrik (16%) yang memiliki kantor perwakilan Disdukcapil dengan peralatan memadai, sementara 43 distrik lainnya (84%) tidak memiliki infrastruktur pelayanan permanen, sehingga harus mengandalkan program jemput bola atau merujuk masyarakat ke kantor pusat di Dekai. Faktor sumber daya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial, menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan kapasitas implementasi. Di Kabupaten Yahukimo, keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam mencapai target akselerasi penerbitan KK, yang memerlukan strategi prioritas dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Yahukimo yang khas juga menjadi salah satu penghambat dalam akselerasi penerbitan KK. Beberapa faktor sosial-budaya yang menghambat: pemahaman tradisional tentang dokumen formal, kekhawatiran tentang penggunaan informasi pribadi, dan praktik pernikahan adat yang tidak terdokumentasi secara formal. Faktor-faktor ini mencerminkan kesenjangan antara sistem administratif formal negara dan praktik sosial-budaya masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo.

Dampak keragaman bahasa terhadap efektivitas komunikasi dan sosialisasi program penerbitan KK. Kesenjangan bahasa tidak hanya menyebabkan hambatan praktis dalam komunikasi, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman konseptual yang lebih mendalam, misalnya tentang definisi "keluarga" dalam konteks administratif vs konteks adat.

Beberapa norma dan praktik sosial yang mempengaruhi pengurusan KK: pembagian peran gender dalam urusan administratif, kekhawatiran tentang implikasi mendaftarkan diri, praktik pengasuhan anak oleh keluarga luas, dan persepsi selektif tentang pentingnya KK. Norma dan praktik ini membentuk pola interaksi masyarakat dengan sistem administratif formal. Data menunjukkan bahwa dari total keluarga yang belum memiliki KK di Kabupaten Yahukimo, sekitar 35% disebabkan oleh faktor sosial-budaya, termasuk ketiadaan dokumen pernikahan formal (20%), keengganan memberikan data pribadi (8%), dan praktik pengasuhan anak oleh keluarga luas tanpa dokumen formal (7%). Faktor sosial dan budaya, seperti pemahaman tradisional tentang dokumen

pemerintah, keengganan memberikan informasi pribadi, dan praktik pernikahan adat yang belum dilegalisasi secara formal, merupakan tantangan sosiokultural. Di Kabupaten Yahukimo, pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan sosiokultural.

d. Faktor Administratif

Selain faktor eksternal seperti geografis dan sosial-budaya, akselerasi penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo juga menghadapi hambatan administratif yang terkait dengan persyaratan dan prosedur.

Tiga hambatan administratif utama: ketiadaan dokumen pendukung, ketidaksesuaian data antarberkas, dan prosedur validasi yang panjang. Hambatan ini mencerminkan kesenjangan antara persyaratan administratif formal dan realitas dokumentasi di masyarakat pedesaan dan terpencil.

Hambatan teknologi dan pengelolaan informasi dalam proses administratif, termasuk keterbatasan akses internet, ketidaksinkronan database, dan tantangan pengelolaan arsip. Hambatan ini mencerminkan kesenjangan digital dan infrastruktur informasi di Kabupaten Yahukimo.

Hambatan administratif dari perspektif masyarakat, termasuk kompleksitas formulir, waktu proses yang panjang, dan kebutuhan untuk mengulang proses karena kesalahan atau kekurangan berkas. Hambatan ini mencerminkan kesenjangan antara kapasitas administratif masyarakat dan tuntutan prosedural sistem formal. Data menunjukkan bahwa rata-rata waktu proses penerbitan KK di Kabupaten Yahukimo adalah 14 hari kerja untuk berkas yang lengkap, dan dapat mencapai 30-45 hari kerja untuk berkas yang memerlukan verifikasi tambahan atau mengalami ketidaklengkapan dokumen. Waktu proses ini jauh lebih lama dibandingkan standar nasional yang menetapkan waktu proses maksimal 7 hari kerja. Faktor administratif, seperti ketiadaan dokumen pendukung, ketidaksesuaian data antarberkas, dan prosedur validasi yang panjang, menunjukkan kompleksitas sistem administrasi kependudukan. Di Kabupaten Yahukimo, interaksi antara sistem administrasi formal dan praktik informal masyarakat perlu diakomodasi untuk menciptakan sistem yang lebih efektif.

e. Faktor Kebijakan

Faktor penghambat lainnya terkait dengan aspek kebijakan, baik kebijakan nasional maupun daerah, yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi khusus Kabupaten Yahukimo.

Dua aspek kebijakan yang menghambat: perubahan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi memadai dan kebijakan nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal. Kedua aspek ini mencerminkan kesenjangan antara formulasi kebijakan di tingkat pusat dan realitas implementasi di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Yahukimo.

Kesenjangan antara formula alokasi anggaran standar dan kebutuhan aktual daerah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Yahukimo. Kebijakan anggaran yang tidak mempertimbangkan secara proporsional faktor kesulitan geografis menyebabkan keterbatasan sumber daya untuk program penerbitan KK, yang pada gilirannya mempengaruhi cakupan dan intensitas program. Data menunjukkan bahwa anggaran per kapita untuk pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Yahukimo adalah sekitar Rp 10.000, sementara estimasi kebutuhan aktual untuk mencapai cakupan universal adalah sekitar Rp 25.000-30.000 per kapita, mengingat faktor kesulitan geografis dan dispersi permukiman. Masyarakat juga merasakan dampak dari kebijakan yang tidak sepenuhnya adaptif dengan kondisi lokal.

Beberapa kebijakan atau persyaratan yang sulit dipenuhi dalam konteks lokal, termasuk persyaratan dokumen pernikahan resmi dan kehadiran seluruh anggota keluarga untuk verifikasi

data. Kebijakan dan persyaratan ini mungkin rasional dalam konteks urban atau semi-urban, tetapi menjadi hambatan signifikan dalam konteks pedesaan dan terpencil seperti di Kabupaten Yahukimo. Faktor kebijakan, seperti perubahan regulasi pusat dan keterbatasan alokasi anggaran, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Di Kabupaten Yahukimo, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual untuk mengakomodasi karakteristik khusus wilayah ini.

Dalam upaya mengakselerasi penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Yahukimo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat strategis dan kompleks. Mengingat kondisi geografis Yahukimo yang cukup ekstrem, dengan sebagian besar wilayah hanya dapat diakses melalui jalur udara dan keterbatasan infrastruktur, maka peran dinas ini tidak sebatas administratif, tetapi mencakup dimensi sosial, teknis, dan kebijakan yang luas. Peran tersebut dapat dijelaskan melalui delapan fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, peran sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, Disdukcapil bertanggung jawab menerapkan kebijakan nasional maupun daerah terkait administrasi kependudukan, khususnya penerbitan KK, ke dalam bentuk prosedur dan layanan yang kontekstual dengan kondisi Yahukimo. Mengingat tidak semua warga memiliki dokumen lengkap, Disdukcapil melakukan pendekatan alternatif dengan melibatkan tokoh adat dan kepala kampung dalam proses verifikasi identitas. Hal ini merupakan bentuk adaptasi kebijakan agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar negara.

Kedua, sebagai penyedia layanan publik, Disdukcapil menyediakan berbagai layanan penerbitan KK melalui sistem pelayanan satu atap di ibu kota kabupaten, Dekai, serta secara aktif melaksanakan program jemput bola ke distrik-distrik terpencil. Program ini sangat penting untuk menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki akses transportasi memadai. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pengurusan dokumen tanpa harus datang ke pusat layanan yang jauh.

Ketiga, sebagai fasilitator, Disdukcapil berupaya mendampingi masyarakat agar dapat memahami pentingnya dokumen kependudukan serta prosedur yang harus diikuti. Edukasi diberikan secara langsung dalam bentuk pendampingan pengisian formulir, penyusunan surat pengantar dari pemerintah kampung, serta pembuatan panduan visual sederhana yang disesuaikan dengan tingkat literasi warga. Disdukcapil juga melatih petugas lokal dan relawan untuk membantu pelaksanaan pelayanan di distrik-distrik.

Keempat, peran sebagai pengelola data diwujudkan dengan memastikan bahwa semua data yang masuk dalam KK tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun keterbatasan akses internet menjadi tantangan serius, pencatatan dilakukan secara manual terlebih dahulu, kemudian diunggah ke sistem nasional saat jaringan tersedia. Ketelitian dalam pengelolaan data menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan validitas informasi yang digunakan oleh lembaga lain seperti sekolah, rumah sakit, dan dinas sosial.

Kelima, Disdukcapil juga berperan sebagai advokat kebijakan. Dinas ini secara aktif mendorong dan mengusulkan dukungan anggaran maupun kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dan pusat agar program akselerasi penerbitan KK bisa berjalan optimal. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan berkala, audiensi lintas sektor, dan penyusunan program berbasis kebutuhan lokal.

Keenam, sebagai katalisator perubahan sosial, Disdukcapil memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, khususnya KK.

Melalui pendekatan berbasis kultural dan persuasif, dinas ini bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat dalam menyampaikan pesan edukatif kepada warga. Tujuannya adalah mengubah sikap pasif masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengurus administrasi kependudukan.

Ketujuh, Disdukcapil menjalankan fungsi sebagai koordinator dengan membangun kolaborasi lintas sektor, baik dengan lembaga pendidikan, instansi kesehatan, aparat kampung, maupun organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini penting untuk menyatukan data dan memperluas cakupan layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan KK bersamaan dengan layanan lainnya seperti imunisasi, pendidikan anak, atau bantuan sosial.

Kedelapan, sebagai inovator, Disdukcapil terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, seperti sistem antrian yang efisien, waktu penerbitan KK maksimal lima hari kerja, dan pembukaan layanan konsultasi khusus. Mereka juga mencari metode verifikasi identitas alternatif untuk mengakomodasi kondisi masyarakat pedalaman yang belum memiliki dokumen resmi.

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo telah memainkan peran yang luas dan adaptif dalam upaya mempercepat penerbitan Kartu Keluarga. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan SDM, berbagai strategi yang diterapkan menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak dasarnya atas identitas hukum yang sah.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam percepatan penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Yahukimo, dengan penekanan pada empat dimensi: kontribusi, kesadaran, keterlibatan, dan kemitraan. Dari keempat dimensi tersebut, kontribusi masyarakat menempati posisi paling signifikan. Ketika masyarakat secara aktif mempersiapkan dokumen persyaratan dan melakukan verifikasi awal melalui tokoh adat, proses penerbitan KK terbukti menjadi lebih efisien. Hal ini terlihat dari penghematan waktu hingga 85% dalam tahapan pelayanan, khususnya di wilayah pedalaman dengan akses layanan yang terbatas.

Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, literasi administratif, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan dalam mengakses layanan publik. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pelayanan pun belum maksimal, mengingat hambatan geografis dan ekonomi yang membatasi mobilitas ke kantor Disdukcapil.

Di sisi lain, kemitraan antara petugas Disdukcapil dan tokoh masyarakat sudah mulai terbentuk, namun belum dilembagakan secara formal. Keberadaan tokoh adat dan tokoh agama sebagai perantara sosial terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam mengikuti proses administrasi kependudukan, meski belum seluruhnya dijadikan strategi tetap oleh pemerintah daerah.

Temuan ini memperkaya dan sekaligus memperkuat temuan dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian Felisa Rizky Amalia (2020) mengenai One Day Service di Kabupaten Tabanan menunjukkan efektivitas inovasi layanan kependudukan, namun kurang menggali aspek partisipasi masyarakat. Penelitian ini menambahkan bahwa inovasi teknis saja tidak cukup tanpa didukung kontribusi aktif dari warga, terutama dalam pengumpulan dokumen.

Sementara itu, Erna Widya Lestari (2020) yang meneliti pengurusan akta kelahiran di

Semarang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan dengan akses layanan yang baik. Kondisi ini berbeda dengan Yahukimo, di mana hambatan geografis dan literasi informasi menjadi tantangan utama. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang kontekstual dengan karakteristik daerah terpencil.

Rasdiana dan Riski Ramadani (2021) menemukan bahwa responsivitas pelayanan administrasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur dan kualitas SDM. Penelitian ini mendukung temuan tersebut, namun menambahkan bahwa faktor sosial-budaya juga menjadi penghambat signifikan di Yahukimo. Ketergantungan masyarakat terhadap sistem adat serta kurangnya urgensi terhadap dokumen administrasi menjadi tantangan tersendiri yang tidak ditemukan di daerah lain.

Dalam penelitian Muhammad Raafiq Namora (2023) mengenai transformasi digital pelayanan melalui aplikasi Si Rancak di Kota Padang, fokus diberikan pada kemajuan teknologi digital. Temuan ini berbeda konteks dengan Yahukimo, di mana layanan digital belum dapat diandalkan karena minimnya akses internet dan perangkat digital. Sebaliknya, strategi jemput bola dan kemitraan berbasis lokal menjadi lebih relevan dan berdampak nyata di daerah ini.

Akhirnya, Sumiati dan Lestari (2020) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan umumnya masih pasif. Penelitian ini menguatkan pandangan tersebut, tetapi juga menawarkan solusi berbasis lokal, yaitu integrasi peran tokoh masyarakat dan pendekatan sosial-budaya dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan di daerah seperti Yahukimo tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi nasional. Partisipasi masyarakat yang dibangun melalui pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan berbasis budaya lokal merupakan kunci dalam mempercepat penerbitan dokumen kependudukan secara efektif dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting, terutama dalam dimensi kontribusi. Dimensi ini terbukti paling efektif dalam mempercepat proses penerbitan KK, karena partisipasi aktif masyarakat seperti kelengkapan dokumen dan verifikasi oleh tokoh lokal secara signifikan mempercepat waktu layanan. Namun, dimensi kesadaran, keterlibatan, dan kemitraan masih menghadapi kendala akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Faktor penghambat bersifat multidimensi, mencakup tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta faktor sosial dan administratif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan adaptif, seperti peningkatan layanan jemput bola, kerja sama dengan tokoh adat, penyederhanaan prosedur, dan advokasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo memainkan peran strategis melalui fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, penyedia layanan, fasilitator, dan pengelola data. Inovasi dan adaptasi yang dilakukan instansi ini menjadi kunci dalam mempercepat penerbitan KK dan memperluas jangkauan layanan kependudukan kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya

penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Partisipasi Masyarakat Dalam Akselerasi Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bahabol, Y., Pakasi, C. B. D., & Timban, J. F. J. (2018). Partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur jalan pertanian melalui (PNPM-PPIP) di Desa Kini Kecamatan Hilipuk Kabupaten Yahukimo. *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 13–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/20127>
- Craig, A. W. (2023). Governing through gridlock: Bill composition under divided government. *State Politics & Policy Quarterly*, 23(4), 396–419. <https://www.scopus.com/pages/publications/85179039215>
- Fatimah, Y. (2019). Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penempatan Pejabat Struktural di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA*, 7(2), 103–125. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/article/view/1149>
- Giotopoulos, K. C., et al. (2025). Dynamic workload management system in the public sector: A comparative analysis. Department of Management Science and Technology, University of Patras. <https://www.scopus.com/pages/publications/105001254724>
- Indrayani, E., & Gatningsih, G. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda* (pp. 1-241). IPDN PRESS
- Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. *International Journal of Diversity in Education*, 25(2), 1–21. <https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740>
- Lestari, E. W. (2015). Partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan (Kajian pada pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya). *Publika*, 3(6). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/12097>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Putri, F. A. I., & Puspaningrum, I. I. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan berbasis identitas kependudukan digital (Suatu studi di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1). <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/4091>

- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(2), 128–137. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/2317>
- Utami, S. (2016). Pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan) [Tesis, Universitas Terbuka]. Repositori Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id/7363/>
- Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>